

Sosialisasi Pentingnya Adiministrasi Penduduk di Desa Bandar Kumbul

<sup>1</sup>Muhammad Khoirul Ritonga, <sup>2</sup>Toni, <sup>3</sup>Agus Anjar, <sup>4</sup>Panggih Nur Adi, <sup>5</sup>Cindy Dwi Ritonga, <sup>6</sup>Muhammad Al-Qori, <sup>7</sup>Dwi Yuliana

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Labuhanbatu

E-mail: <sup>1</sup>[muhammadkhairul529@gmail.com](mailto:muhammadkhairul529@gmail.com), <sup>2</sup>[toni300586@gmail.com](mailto:toni300586@gmail.com), <sup>3</sup>[agusanjartiga@gmail.com](mailto:agusanjartiga@gmail.com),  
<sup>4</sup>[panggi.s3@gmail.com](mailto:panggi.s3@gmail.com), <sup>5</sup>[cindydwiritonga@gmail.com](mailto:cindydwiritonga@gmail.com), <sup>6</sup>[muhammmadalqori@gmail.com](mailto:muhammmadalqori@gmail.com),  
<sup>7</sup>[dwiyluliana@gmail.com](mailto:dwiyluliana@gmail.com)

*Corresponding Author:* [toni300586@gmail.com](mailto:toni300586@gmail.com)

**Abstrak**

Kegiatan Sosialisasi tentang Pentingnya Administrasi Penduduk ini merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas Labuhanbatu dibantu oleh perangkat Desa. Target pengabdian kepada masyarakat ini yaitu kelompok masyarakat di Desa Bandar Kumbul. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Bandar Kumbul yaitu kurangnya pengetahuan warga akan pentingnya memiliki dokumen-dokumen kependudukan, kurangnya informasi tentang bagaimana cara pengurusan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan, dan adanya informasi yang salah bahwa mengurus dokumen-dokumen kependudukan itu mahal dan sulit. Tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini adalah agar masyarakat memahami dan menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan bagi warga negara.

**Kata Kunci:** : Sosialisasi, Administrasi Penduduk.

**Pendahuluan**

Secara terminologi, yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, dan mengelola (Ali F, 2011). Administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Dari dua pendapat ini jelas bahwa administrasi itu adalah kegiatan mengurus, mengatur menata dan mengelola terhadap suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan (Anggara S, 2012).

Administrasi penduduk adalah rangkaian kegiatan penataan serta penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayan publik, pemerintahan dan pembangunan.

Menurut UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk mendukung

pendataan penduduk tersebut telah disahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam hal ini kegiatan Sosialisasi Penting Administrasi Penduduk yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dibantu oleh Perangkat Desa berlokasi di Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan keterangan yang ada, bahwa di Desa Bandar Kumbul yang berada di Kecamatan Bilah Barat ini dalam segi pendidikan dapat di kategorikan cukup baik, karena terbukti dengan banyaknya lulusan-lulusan dari Perguruan tinggi. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang dikategorikan tidak mampu yang belum bisa melanjutkan sekolahnya ke Perguruan tinggi dikarenakan keterbatasan biaya.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun tingkat pendidikan di Desa Bandar Kumbul dapat di kategorikan cukup baik, namun setelah dilakukan penelusuran, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai dokumen-dokumen penting tersebut. Setelah dilakukan observasi yang lebih jauh, ternyata kendalanya terdapat pada ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen-dokumen tersebut untuk dirinya, ada juga yang beralasan karena malas mengurusnya karena lokasi yang jauh. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini semoga dapat memberikan pemahaman tentang Administrasi Penduduk sehingga masyarakat menjadi paham dan sadar akan pentingnya dokumen kependudukan seperti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibuatlah berbagai peraturan atau undang-undang yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang merupakan manifestasi dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa; Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Di dalam Undang-Undang ini hak-hak keperdataan warga negara diatur dan dilindungi oleh Negara yang selanjutnya antara lain diatur pula di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019.

Tujuan utama dari perubahan undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Pentingnya dokumen kependudukan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, adalah karena dokumen tersebut merupakan identitas pribadi yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik bagi warga negara Indonesia. Dalam UU Nomor

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi :

- 1) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22).
- 2) Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29 PP No. 37 Tahun 2007).
- 3) Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

#### **A. Permasalahan**

Berdasarkan analisis situasi dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Desa Bandar Kumbul yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan warga akan pentingnya memiliki dokumen-dokumen kependudukan.
- 2) Kurangnya informasi tentang bagaimana cara pengurusan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan.
- 3) Adanya informasi yang salah bahwa mengurus dokumen-dokumen kependudukan itu mahal dan sulit.

#### **B. Solusi Dalam Menyelesaikan Permasalahan**

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat pada mitra dalam sosialisasi ini tentunya sangat diperlukan solusi. Ada beberapa solusi alternatif yaitu :

- 1) Mendata berapa jumlah warga yang belum memiliki dokumen-dokumen kependudukan bekerjasama dengan perangkat desa.
- 2) Mengundang warga dengan mendatangi rumah-rumah warga agar datang ke Kantor Kepala Desa Bandar Kumbul.
- 3) Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya memiliki dokumen-dokumen kependudukan kepada masyarakat yang langsung diadakan di sekitar pemukiman warga.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu ini melibatkan para Dosen dan Mahasiswa Universitas Labuhanbatu. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini menggunakan metode Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Pentingnya Administrasi Penduduk di Desa Bandar Kumbul. Kegiatan ini dilaksanakan pada

hariSenintanggal 17 Januari 2022. Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini agar masyarakat dapat memahami dan menyadari akan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Target pengabdian kepada masyarakat ini yaitu kelompok masyarakat di Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu yang belum dan kurang memahami akan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan. Berdasarkanhasil dari pelaksanaan Sosialisasi Administrasi Penduduk ini yaitu dari sosialisasi dan pemaparan yang telah dilaksanakan terdapat adanya perubahan yang lebih baik. Data sebelum dan sesudah sosialisasi menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu warga yang belum melengkapi administrasi kependudukan sebelumnya, sesudah sosialisasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan mereka akhirnya mengurus kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan yang dibantu oleh pelayan dan ridinas kependudukan dan catatansipil Kabupaten Labuhanbatu.



Gambar 1. Keterangan : Pemaparan materi sosialisasi bersama warga desa Bandar Kumbul



Gambar 2. Keterangan : Kegiatan tanya jawab dengan warga Desa Bandar Kumbul

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan yang diperoleh yaitu dengan adanya Sosialisasi Administrasi kependudukan akhirnya masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang mereka kurang mengerti, khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran warga untuk memiliki dokumen-dokumen kependudukan agar masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap surat-surat untuk menjadi warga negara.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi: Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 1 tentang Status Kewarganegaraan Republik Indonesia